

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi data yang telah diuraikan pada BAB IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2013 dan 2015 realisasi pendapatan yang diperoleh terhadap anggaran yang ditetapkan telah tercapai atau dengan kata lain realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan sudah efektif. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sudah sangat efektif dalam melakukan penagihan pajak daerah. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan yang diperoleh terhadap anggaran yang ditetapkan belum tercapai atau dengan kata lain realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan belum efektif. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Belu belum efektif dalam melakukan penagihan pajak daerah dan belum efektif dalam pemantauan terhadap pendapatan daerah.
2. Pada tahun 2013 dan 2015 persentase derajat desentralisasi rendah dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Pada tahun 2014 persentase derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Belu mengalami peningkatan, meskipun mengalami peningkatan dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kemampuan yang kurang.

3. Pada tahun 2013 persentase ketergantungan keuangan daerah terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi tinggi. Pada tahun 2014 dan 2015 persentase ketergantungan keuangan daerah terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi menurun karena realisasi dana bantuan yang diberikan tidak mencapai target yang dianggarkan. Dengan adanya ketergantungan ini, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah belum efektif dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah yang ada dalam teritori Kabupaten Belu.
4. Rasio efektivitas Kabupaten Belu menunjukkan bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sangat efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah dan pendapatan non asli daerah.
5. Rasio efisiensi Kabupaten Belu menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Belu pada tahun 2013 dan 2014 dikatakan kurang efisien. Pada tahun 2015 efisiensi PAD menjadi efektif. Perubahan ini disebabkan oleh karena realisasi pajak daerah lebih besar dari anggaran yang ditargetkan sedangkan retribusi daerah lebih kecil dari anggaran yang di targetkan yang mengakibatkan sedikitnya biaya untuk memungut PAD. Perubahan yang terjadi pada tahun 2015 ini menggambarkan bahwa dengan mengeluarkan biaya (biaya pajak dan retribusi untuk memperoleh PAD) yang relatif sedikit, pemerintah daerah memperoleh penerimaan yang optimal. Dengan adanya perubahan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam melakukan pemungutan pajak pada tahun 2015 menjadi lebih efisien.

6. Pada tahun 2013, 2014 dan 2015 analisis varians belanja secara umum terdapat selisih anggaran belanja bersaldo negatif. Dari segi nominal jumlah realisasi belanja yang direalisasikan pemerintah daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan akan tetapi jumlah tersebut masih lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Belu telah efisien karena bisa memanfaatkan anggaran belanja tidak sampai melebihi anggaran yang ditetapkan.
7. Rasio efisiensi belanja Kabupaten Belu pada tahun 2013, 2014 dan 2015 sudah efisien. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Realisasi belanja daerah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 secara keseluruhan penghematan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu sudah efisien.

B. Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil perhitungan dan evaluasi pada BAB IV, maka saran yang diberikan penulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu harus mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan dari Pemerintah Pusat, agar dapat mencapai kondisi tingkat kemampuan keuangan yang ideal. Caranya, dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk mengurangi besarnya dana

bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sebaiknya perlu melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Pembangunan Daerah sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Edisi Revisi. Rnika Cipta. Jakarta
- Asem, Laurencius. 2015. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Sebagai Pengendalian Internal Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tambrau*w. Skripsi. Universitas Katolik Widya Karya
- Baru, Didimus. 2016. *Analisis Penganggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang*. Skripsi. Universitas Katolik Widya Karya
- Basri, Ramlah. 2013. *Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174, Vol 1. Akses tgl 4 Desember 2013. Hal. 202-212
- Bisma, I Dewa Gde, dan Hery Susanto, 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, Ganec Swara Edisi Khusus, vol 4, No. 3, Desember 2010
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad. 2011. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Yogyakarta
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Honga, Ardon dan Ilat, Ventje. 2014. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174, Vol 2. Akses tgl 4 Desember 2014. Hal.278-28
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA)
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ketiga. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Peraturan Bupati Belu Nomor 64 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Belu

Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 32 Tentang Pemerintahan Daerah

Wadengga, Galuwesius. 2015. *Analisis Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel*. Skripsi. Universitas Katolik Widya Karya

